

## **Respons Perempuan Tani Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Keberlanjutan Sektor Pertanian Lokal di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan**

**Oleh:** Syaifudin Suhri Kasim<sup>1)</sup>, Ratna Supiyah<sup>2)</sup>, Aryuni Salpiana Jabar<sup>3)</sup>, Suharty Roslan<sup>4)</sup>, Megawati A. Tawulo<sup>5)</sup>, Asrani<sup>6)</sup>

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

\*Corresponding Author: [syaifudinsuhrikasim@gmail.com](mailto:syaifudinsuhrikasim@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to analyze women farmers' responses to local government policies in encouraging the sustainability of the local agricultural sector in Konda District, South Konawe Regency. The research focus includes evaluating the level of participation of women farmers, the obstacles they face, and the impact of policies on economic and social sustainability in local farming communities. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of regional policy documents related to the agricultural sector. Key informants consisted of women farmers, agricultural extension workers, local government officials and local community leaders. The research results show that women farmers in Konda District have an important role in supporting agricultural sustainability, especially through managing harvests, diversifying businesses, and strengthening social networks. However, their level of participation in the policy planning and implementation process is still low due to minimal access to policy information, limited capacity, and the burden of multiple roles. Regional government policies, such as providing fertilizer subsidies and training programs, are considered not fully responsive to the needs of women farmers. However, several female farmers demonstrated good adaptability by utilizing program assistance to increase land productivity and household income. This research concludes that successful agricultural sustainability policies require stronger integration of gender perspectives, especially in providing equal access to resources and decision making. Strategic recommendations include strengthening training based on local needs, increasing access to information, and empowering women farmers through collaborative programs with local communities and the private sector. It is hoped that these findings can provide input for local governments to develop more inclusive and effective policies in encouraging the sustainability of the local agricultural sector.*

**Key Words:** *Women Farmers, Policy, Government, Local Agriculture*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons perempuan tani terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan sektor pertanian lokal di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Fokus penelitian mencakup evaluasi tingkat partisipasi perempuan tani, hambatan yang mereka hadapi, serta dampak kebijakan terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam komunitas petani lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan daerah terkait sektor pertanian. Informan kunci terdiri dari perempuan tani, penyuluh pertanian, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan tani di Kecamatan Konda memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pertanian, terutama melalui pengelolaan hasil panen, diversifikasi usaha, dan penguatan jaringan sosial. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan

implementasi kebijakan masih rendah akibat minimnya akses terhadap informasi kebijakan, keterbatasan kapasitas, serta beban peran ganda. Kebijakan pemerintah daerah, seperti penyediaan subsidi pupuk dan program pelatihan, dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan tani. Meski demikian, beberapa perempuan tani menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dengan memanfaatkan bantuan program untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan keberlanjutan pertanian memerlukan integrasi perspektif gender yang lebih kuat, terutama dalam memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Rekomendasi strategis meliputi penguatan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, peningkatan akses informasi, serta pemberdayaan perempuan tani melalui program kolaboratif dengan masyarakat lokal dan pihak swasta. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam mendorong keberlanjutan sektor pertanian lokal.

**Kata Kunci:** Perempuan Tani, Kebijakan, Pemerintah, Pertanian Lokal

---

## PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berfokus pada peran penting perempuan tani dalam keberlanjutan sektor pertanian lokal dan bagaimana respons mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah memengaruhi perkembangan sektor ini. Di Indonesia, perempuan tani memegang peran yang semakin signifikan dalam sektor pertanian, tidak hanya sebagai pekerja lapangan tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga dan komunitas (Syarif & Zainuddin, 2017) (Mauliyah & Sinambela, 2019). Mereka terlibat dalam berbagai aspek produksi pertanian, seperti penanaman, perawatan, pemanenan, hingga pengelolaan hasil produksi (Busthanul et al., 2023). Selain itu, perempuan tani sering kali berperan dalam perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan sumber daya, dan bahkan penjualan hasil pertanian, menjadikan kontribusi mereka sangat esensial dalam keberlanjutan ekonomi lokal (Ngesti & Husein, 2024).

Namun, di tengah besarnya peran perempuan tani, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pertanian dan mendukung keberlanjutan sektor ini. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, terbatasnya akses ke teknologi pertanian modern, keterbatasan modal, dan sulitnya akses pasar telah menjadi kendala utama yang menghambat upaya perempuan tani dalam mencapai hasil yang optimal. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan sektor pertanian, seperti program bantuan pupuk, pelatihan teknik pertanian berkelanjutan, dan subsidi alat pertanian (Mayrowani, 2016), sering kali kurang efektif karena kurangnya penyesuaian terhadap kondisi spesifik perempuan tani. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan tani secara khusus sering kali tidak dapat memberikan dampak yang optimal dan justru memperlebar kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya yang diperlukan.

Salah satu kebijakan yang sering diterapkan pemerintah daerah adalah pemberian bantuan berupa alat dan bahan pertanian. Namun, kebijakan ini sering kali mengabaikan kenyataan bahwa perempuan tani menghadapi tantangan tersendiri dalam mengakses bantuan tersebut (Indra Kertati, 2022). Perempuan tani mungkin mengalami keterbatasan waktu akibat beban kerja ganda yang mencakup pekerjaan rumah tangga dan pertanian, sehingga sulit untuk mengikuti pelatihan atau memenuhi syarat administratif untuk menerima bantuan. Selain itu, pola budaya dan sosial yang ada di beberapa wilayah di Indonesia masih menganggap peran laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam bidang pertanian, sehingga perempuan tani kerap tidak terlibat dalam pertemuan atau kegiatan sosialisasi kebijakan (Vitasari et al., 2023)(Wulansari et al., 2019). Akibatnya, banyak perempuan tani yang kurang memahami kebijakan pemerintah daerah atau merasa kesulitan untuk mengakses bantuan yang ditawarkan.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah daerah yang lebih inklusif dan mempertimbangkan peran serta kebutuhan perempuan tani terbukti lebih efektif dalam mendorong keberlanjutan sektor pertanian. Misalnya, program pelatihan dan penyuluhan yang dirancang khusus bagi perempuan tani dengan jadwal yang lebih fleksibel serta pendekatan yang lebih ramah gender dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola pertanian secara lebih berkelanjutan (Hayati, 2023). Pemberdayaan perempuan tani melalui koperasi atau kelompok tani yang memperkuat jaringan sosial juga membantu mereka untuk lebih mudah mengakses informasi, teknologi, dan pasar (Trisanti et al., 2023) (Hermawan et al., 2022). Program-program ini mampu memberikan dampak positif dalam jangka panjang, seperti peningkatan hasil panen, penurunan ketergantungan terhadap bahan kimia berbahaya, serta pengembangan produk-produk berbasis kearifan lokal yang memiliki nilai tambah di pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui berbagai kebijakan strategis telah berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian lokal, terutama di Kecamatan Konda yang dikenal dengan potensi pertaniannya yang melimpah. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan petani, mengurangi ketimpangan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah peningkatan akses terhadap teknologi pertanian dan sistem informasi (Hartini, 2022) (Nurkholis et al., 2023). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah mengimplementasikan program pelatihan dan pendampingan teknis bagi para petani untuk memperkenalkan metode pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (Febrinasari & Irfan, 2023) (Ammarnurhandyka et al., 2023). Teknologi yang diperkenalkan meliputi teknik pertanian modern seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan hama terpadu, dan irigasi yang efisien (Akbar & Wasisto, 2022). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya

manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi petani juga menjadi prioritas agar mereka dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih produktif dan menguntungkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berfokus pada penguatan kelembagaan pertanian di tingkat desa. Pembentukan kelompok tani yang kuat dan terorganisir di Kecamatan Konda menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian. Kelompok tani ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi dan teknologi, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam implementasi kebijakan serta pengelolaan dana bantuan pertanian (Riani et al., 2021) (Nado et al., 2023). Melalui kolaborasi ini, para petani di Kecamatan Konda dapat lebih mudah mengakses bantuan seperti bibit unggul, alat pertanian modern, dan fasilitas pasar yang lebih baik.

Dukungan lain yang diberikan adalah pemberian insentif bagi petani yang menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan (Buchori, 2014) (Sari et al., 2016). Program-program seperti subsidi untuk penggunaan pupuk organik, pembiayaan mikro bagi petani, serta peningkatan akses pasar untuk produk pertanian lokal menjadi bagian dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para petani agar lebih berorientasi pada produksi yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam sektor pertanian. Program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti konservasi tanah dan air, menjadi prioritas dalam kebijakan pertanian yang diterapkan (Juwianti & Adawiyah, 2023). Pemerintah daerah berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam melalui program penghijauan dan pemeliharaan lahan pertanian agar tidak mengalami degradasi (Gultom et al., 2022).

Kebijakan pemerintah daerah yang berbasis pada keberlanjutan sektor pertanian ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat petani yang mandiri, sejahtera, dan sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (Laksana & Gustav, 2022). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Kecamatan Konda dan menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks keberlanjutan, perempuan tani memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam memperkenalkan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan. Sebagai pelaku utama yang berinteraksi langsung dengan tanah dan tanaman, perempuan tani sering kali memiliki pengetahuan lokal yang kaya mengenai kondisi tanah, pola cuaca, dan jenis tanaman yang sesuai untuk lingkungan mereka (Toansiba et al., 2021). Jika pemerintah daerah mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal ini dalam kebijakan pertanian, seperti dalam pemilihan jenis

tanaman yang sesuai untuk kondisi iklim lokal atau metode pengendalian hama yang alami, hal ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari praktik-praktik pertanian yang merusak ekosistem. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tani tidak hanya berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

Respons perempuan tani terhadap kebijakan pemerintah daerah bervariasi, tergantung pada seberapa relevan dan aplikatif kebijakan tersebut terhadap kondisi mereka sehari-hari. Beberapa perempuan tani merespons kebijakan pemerintah dengan antusias, terutama jika kebijakan tersebut memberikan akses yang lebih mudah ke modal, teknologi, atau pasar. Namun, ada pula perempuan tani yang skeptis terhadap kebijakan pemerintah karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua program berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya, beberapa bantuan yang diberikan terkadang tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan, sehingga perempuan tani merasa kebijakan tersebut hanya memberikan dampak sementara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan respons perempuan tani sebagai masukan untuk evaluasi kebijakan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk menggambarkan dan menganalisis respons perempuan tani terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam konteks keberlanjutan sektor pertanian lokal. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan strategi adaptasi perempuan tani.

### **2. Lokasi dan Subjek Penelitian**

- Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani.
- Subjek Penelitian adalah perempuan tani yang memiliki peran aktif dalam aktivitas pertanian serta pengambil kebijakan lokal, seperti kepala desa, penyuluh pertanian, dan perwakilan pemerintah daerah.

Kriteria subjek penelitian:

1. Perempuan tani yang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian.
2. Perempuan tani yang memahami kebijakan pemerintah terkait sektor pertanian.
3. Pihak pemerintah daerah dan penyuluh pertanian yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Dilakukan terhadap perempuan tani untuk memahami persepsi, pengalaman, dan respons mereka terhadap kebijakan pemerintah daerah. Wawancara juga dilakukan kepada pihak pemerintah daerah dan penyuluh pertanian untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang diterapkan.

- **Observasi Partisipatif**

Mengamati aktivitas perempuan tani dalam keseharian mereka, khususnya terkait praktik pertanian, partisipasi dalam program pemerintah, dan strategi adaptasi.

- **Dokumentasi**

Mengumpulkan dokumen terkait kebijakan pemerintah daerah di sektor pertanian, seperti program, laporan, dan data statistik.

#### **4. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah subjek disesuaikan dengan prinsip saturasi data, yakni hingga tidak ada informasi baru yang muncul.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan model analisis tematik (thematic analysis) yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Reduksi Data**, yaitu menyortir data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memilih informasi yang relevan.
2. **Kategorisasi Data** yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema, seperti respons perempuan tani terhadap kebijakan, strategi adaptasi, dan hambatan dalam implementasi kebijakan.
3. **Penyajian Data** yaitu menyusun temuan dalam bentuk deskripsi naratif yang dilengkapi dengan kutipan data untuk mendukung analisis.
4. **Penarikan Kesimpulan** yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dari hasil analisis tematik.

#### **6. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan melalui proses sebagai berikut.

- **Triangulasi Sumber**, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (perempuan tani, penyuluh, dokumen kebijakan).
- **Member Checking**, yaitu memastikan hasil wawancara sesuai dengan pemahaman responden.
- **Audit Trail** yaitu, mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Sektor Pertanian**

Kabupaten Konawe Selatan, dengan potensi agraris yang melimpah, memprioritaskan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah terus menggulirkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta menjaga ketahanan pangan lokal. Berikut adalah beberapa langkah kebijakan yang menjadi fokus utama, antara lain:

#### **1. Peningkatan Infrastruktur Pertanian**

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan aktif membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi, akses jalan ke area pertanian, dan fasilitas pascapanen. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah distribusi hasil pertanian sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi.

#### **2. Dukungan Teknologi dan Penyuluhan**

Pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian menjadi perhatian khusus, dengan mendorong petani untuk mengadopsi mekanisasi dan teknik pertanian berkelanjutan. Pemerintah juga mengadakan pelatihan dan penyuluhan rutin melalui Dinas Pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi tantangan agribisnis.

#### **3. Program Subsidi dan Bantuan Pertanian**

Untuk meringankan beban petani, pemerintah menyediakan subsidi pupuk, benih unggul, dan alat mesin pertanian (alsintan). Selain itu, program bantuan langsung berupa modal usaha juga diberikan kepada kelompok tani untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka.

#### **4. Diversifikasi dan Hilirisasi Produk Pertanian**

Kebijakan diversifikasi tanaman diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Pemerintah daerah bekerja sama dengan UMKM untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, seperti pembuatan produk olahan lokal yang mampu bersaing di pasar regional dan nasional.

#### **5. Penguatan Kelembagaan Petani**

Pembentukan dan penguatan kelompok tani serta koperasi menjadi prioritas untuk meningkatkan daya tawar petani. Melalui lembaga ini, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pasar, modal, dan teknologi.

#### **6. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menerapkan kebijakan berbasis kearifan lokal. Hal ini mencakup pelestarian lahan pertanian produktif, rehabilitasi lahan kritis, dan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan.

## **7. Kemitraan dengan Swasta dan Akademisi**

Pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi di sektor pertanian. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan solusi berbasis data yang relevan dengan kebutuhan lokal.

## **8. Respons terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional, Kabupaten Konawe Selatan juga mendukung program strategis seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan tani. Misalnya, melalui pelibatan perempuan dalam penguatan ekonomi berbasis pertanian lokal.

Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berkomitmen untuk menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup petani dan menciptakan ketahanan pangan yang tangguh di tingkat regional.

### **Profil Perempuan Tani di Kecamatan Konda**

#### **Peran dan Kontribusi Perempuan Tani dalam Sistem Pertanian Lokal di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan**

Perempuan tani di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, memainkan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem pertanian lokal. Sebagai komunitas agraris, masyarakat di wilayah ini sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Dalam konteks tersebut, perempuan tani tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja pendukung tetapi juga menjadi penggerak utama dalam berbagai aspek pertanian.

#### **Peran Perempuan Tani**

##### **1. Pengelolaan Produksi Pertanian**

Perempuan tani secara aktif terlibat dalam pengolahan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga panen. Mereka memiliki pengetahuan tradisional mengenai musim tanam, teknik irigasi lokal, serta penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan.

##### **2. Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga**

Selain terlibat dalam produksi untuk pasar, perempuan tani juga berperan penting dalam mengelola hasil panen untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka memastikan kecukupan pangan keluarga, baik melalui penyimpanan hasil panen maupun pengolahan makanan tradisional yang berbasis bahan lokal.

##### **3. Pengambil Keputusan Ekonomi**

Perempuan tani turut berperan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, seperti alokasi hasil pertanian untuk dijual atau disimpan, serta pengelolaan pendapatan hasil



panen. Peran ini menunjukkan kontribusi mereka dalam memperkuat ekonomi rumah tangga.

### **Kontribusi dalam Sistem Pertanian Lokal**

#### **1. Inovasi Berbasis Kearifan Lokal**

Dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, perempuan tani berkontribusi pada keberlanjutan sistem pertanian berbasis kearifan lokal. Mereka memperkenalkan metode pertanian ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

#### **2. Penguatan Jaringan Sosial**

Perempuan tani juga berperan sebagai penghubung dalam jaringan sosial komunitas pertanian. Mereka sering terlibat dalam kelompok tani atau koperasi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan, akses pasar, dan pengelolaan modal bersama.

#### **3. Diversifikasi Penghasilan**

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, perempuan tani kerap mencari alternatif penghasilan melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah atau berpartisipasi dalam usaha kecil berbasis pertanian.

### **Tantangan dan Harapan**

Peran besar perempuan tani di Kecamatan Konda tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti akses terbatas terhadap teknologi, lahan pertanian yang sempit, serta beban ganda antara pekerjaan di sektor publik dan domestik. Meski demikian, dengan dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan kelompok tani, peran perempuan tani dapat terus diberdayakan.

Investasi dalam pendidikan, pelatihan, serta penyediaan fasilitas pendukung pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi perempuan tani dalam sistem pertanian lokal. Dengan demikian, perempuan tani dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

### **Karakteristik Sosial-Ekonomi Perempuan Tani di Kecamatan Konda**

Perempuan tani di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik, mencerminkan dinamika kehidupan komunitas agraris yang terus berkembang. Kecamatan ini dikenal sebagai wilayah yang didominasi oleh aktivitas pertanian, dengan perempuan memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan sektor tersebut, baik di ranah domestik maupun produktif.

## **1. Karakteristik Sosial**

Secara sosial, perempuan tani di Kecamatan Konda umumnya berasal dari latar belakang keluarga dengan budaya gotong royong yang kuat. Pendidikan mereka rata-rata berada pada tingkat dasar hingga menengah, dengan sebagian kecil yang menempuh pendidikan tinggi. Nilai-nilai tradisional seperti solidaritas komunitas dan pembagian kerja berbasis gender masih melekat kuat, meskipun mulai terlihat perubahan akibat pengaruh modernisasi dan urbanisasi.

Selain itu, perempuan tani di Kecamatan Konda sering kali mengemban peran ganda sebagai pengelola rumah tangga dan pekerja di sektor pertanian. Dalam masyarakat yang kental dengan tradisi patriarki, mereka tetap memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan domestik, meskipun keterlibatan mereka dalam keputusan ekonomi keluarga sering kali terbatas.

## **2. Karakteristik Ekonomi**

Dari sisi ekonomi, perempuan tani di Kecamatan Konda umumnya bekerja sebagai petani subsisten, dengan fokus pada tanaman pangan seperti padi, jagung, dan jenis tanaman hortikultura lainnya. Sebagian dari mereka juga terlibat dalam usaha peternakan kecil-kecilan, seperti ayam dan sapi, sebagai sumber pendapatan tambahan. Pendapatan rata-rata keluarga tani di wilayah ini relatif rendah, sehingga perempuan sering kali mencari peluang kerja di sektor informal, seperti berdagang hasil panen atau bekerja sebagai buruh tani.

Adaptasi ekonomi juga terlihat melalui diversifikasi pendapatan. Perempuan tani tidak hanya mengandalkan hasil pertanian, tetapi juga mulai mengakses program-program pemerintah, seperti bantuan sosial dan pelatihan keterampilan, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga mereka. Hal ini menunjukkan keinginan mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan struktural yang kerap menghantui komunitas pertanian.

## **3. Tantangan Yang Dihadapi**

Perempuan tani di Kecamatan Konda menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, dan teknologi, hingga kendala sosial berupa beban kerja ganda yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah ketidakstabilan harga komoditas pertanian dan minimnya infrastruktur pendukung, seperti koperasi tani dan fasilitas irigasi.

Namun demikian, perempuan tani di Kecamatan Konda menunjukkan daya adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi. Mereka tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga penggerak utama dalam penguatan ketahanan pangan di komunitas mereka.

## **Respons Perempuan Tani terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**

Perempuan tani memiliki peran penting dalam keberlanjutan sektor pertanian, baik sebagai pelaku utama dalam kegiatan agraris maupun sebagai pengelola hasil pertanian di tingkat rumah tangga. Namun, tingkat pemahaman mereka terhadap kebijakan yang diterapkan sering kali menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani dan keberhasilan program pemerintah.

Pemahaman perempuan tani terhadap kebijakan sangat bergantung pada beberapa faktor utama, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, partisipasi dalam pelatihan, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tani. Sebagian besar perempuan tani yang beroperasi di pedesaan sering kali mengalami hambatan dalam mengakses informasi kebijakan akibat minimnya sarana komunikasi yang efektif.

Selain itu, kebijakan yang menggunakan bahasa teknis atau bersifat kompleks cenderung sulit dipahami oleh perempuan tani yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan dasar. Hal ini diperparah dengan minimnya pelibatan mereka dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan kebijakan, sehingga mereka merasa kebijakan tersebut jauh dari kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Namun demikian, terdapat inisiatif-inisiatif positif dari pemerintah dan organisasi lokal untuk meningkatkan pemahaman perempuan tani terhadap kebijakan. Program pelatihan, sosialisasi berbasis komunitas, dan penggunaan media untuk menyebarluaskan informasi kebijakan adalah beberapa upaya yang dapat menjembatani kesenjangan pemahaman ini. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis partisipasi, perempuan tani dapat lebih memahami substansi kebijakan, implikasi terhadap kehidupan mereka, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam implementasinya.

Peningkatan tingkat pemahaman perempuan tani terhadap kebijakan bukan hanya berkontribusi pada keberhasilan program pemerintah, tetapi juga memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan di komunitas mereka, yang pada akhirnya mendorong kemandirian dan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

## **Bentuk Respons Perempuan Tani Terhadap Kebijakan Pemerintah**

Masyarakat dalam berbagai konteks sering kali menunjukkan respons yang beragam terhadap perubahan sosial, ekonomi, atau kebijakan pemerintah. Respons tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu penerimaan, adaptasi, atau penolakan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dalam komunitas tersebut.

### **1. Penerimaan**

Penerimaan terjadi ketika individu atau kelompok menerima perubahan secara positif

tanpa banyak perlawanan. Hal ini biasanya didorong oleh kesadaran akan manfaat yang lebih besar dari perubahan tersebut, keterbukaan terhadap ide-ide baru, atau keyakinan bahwa perubahan sejalan dengan nilai-nilai budaya atau kepentingan mereka. Misalnya, petani yang menerima penggunaan teknologi modern dalam pertanian karena melihat peningkatan produktivitas sebagai hasilnya.

## 2. **Adaptasi**

Adaptasi adalah respons di mana individu atau kelompok tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga menyesuaikan perilaku, pola pikir, dan strategi mereka untuk menghadapi realitas baru. Adaptasi seringkali membutuhkan usaha untuk mempelajari keterampilan baru, membangun jaringan sosial yang lebih luas, atau merancang pendekatan kreatif untuk mengatasi tantangan. Dalam hal ini, perempuan tani di Kecamatan Konda yang menghadapi perubahan ekonomi akibat masuknya sektor informal, menyesuaikan diri dengan diversifikasi sumber penghasilan melalui pekerjaan paruh waktu atau memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian mikro.

## 3. **Penolakan**

Penolakan terjadi ketika individu atau kelompok secara aktif menolak perubahan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan, nilai, atau kebiasaan mereka. Penolakan dapat berupa sikap pasif seperti ketidakpedulian, atau aktif seperti demonstrasi dan advokasi. Faktor yang memengaruhi penolakan umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang perubahan, ketidakpercayaan pada pihak yang membawa perubahan, atau kerugian langsung yang dirasakan. Sebagai contoh, sebagian petani menolak kebijakan alih fungsi lahan karena merasa kehilangan sumber penghidupan utama mereka tanpa kompensasi yang memadai.

Ketiga bentuk respons ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dalam menghadapi perubahan. Setiap respons mencerminkan strategi yang dipilih oleh perempuan tani baik secara individu atau kelompok untuk mempertahankan keberlanjutan hidup mereka sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang dihadapi.

## **Dampak Kebijakan pada Kehidupan Perempuan Tani**

Kehidupan perempuan tani di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kebijakan tersebut mencakup program pemberdayaan perempuan, akses terhadap kredit usaha, bantuan pupuk bersubsidi, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan koperasi pertanian. Namun, penerapan kebijakan ini sering kali memiliki dampak yang beragam terhadap perempuan

tani, yang memainkan peran penting baik di dalam rumah tangga maupun dalam pengelolaan lahan pertanian.

Salah satu dampak positif yang dirasakan adalah meningkatnya akses perempuan tani terhadap sumber daya pertanian. Program bantuan seperti penyediaan pupuk bersubsidi dan pelatihan teknis telah membantu mereka meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan. Selain itu, pelatihan tentang pengelolaan usaha tani memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi.

Namun, ada pula tantangan yang muncul. Banyak kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan tani, sehingga implementasinya kurang efektif. Misalnya, pelatihan sering kali dijadwalkan pada waktu yang tidak sesuai bagi perempuan yang harus mengelola tanggung jawab domestik dan pekerjaan tani secara bersamaan. Selain itu, birokrasi yang rumit dalam program kredit usaha tani membuat perempuan sulit mengakses modal, terutama mereka yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah sebagai jaminan.

Di sisi sosial, beberapa kebijakan secara tidak langsung memengaruhi peran gender dalam komunitas tani. Peningkatan pendapatan perempuan dari program pemberdayaan sering kali memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun, hal ini juga dapat memicu resistensi dari pihak laki-laki jika tidak diiringi dengan pendekatan yang sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya setempat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk merancang kebijakan yang inklusif dan responsif gender. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memperhatikan kebutuhan perempuan tani secara spesifik, termasuk akses ke pendidikan, dukungan modal, dan teknologi ramah lingkungan. Kolaborasi dengan organisasi lokal dan lembaga non-pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.

Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan pertanian tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan perempuan tani sebagai pilar penting dalam pembangunan pedesaan.

### **Hambatan dalam Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah proses penting dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam perumusan kebijakan publik. Namun, pada tahap ini sering muncul berbagai hambatan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hambatan tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang mencerminkan kompleksitas lingkungan kebijakan.

1. **Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Pelaksana**

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan komitmen dari para pelaksana di lapangan. Jika para pelaksana tidak memahami esensi atau tujuan kebijakan, implementasi menjadi tidak konsisten dan cenderung menyimpang dari rencana awal. Selain itu, rendahnya tingkat komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan ketidakseriusan dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah dirancang.

2. **Keterbatasan Sumber Daya**

Sumber daya manusia, finansial, dan material yang tidak memadai sering kali menjadi kendala signifikan. Kekurangan dana dapat menghambat pelaksanaan program-program yang dirancang, sementara kurangnya tenaga kerja yang kompeten dapat memperlambat realisasi kebijakan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung juga dapat mengurangi efektivitas implementasi.

3. **Kompleksitas Regulasi dan Birokrasi**

Prosedur birokrasi yang rumit dan regulasi yang tidak sinkron sering kali memperlambat implementasi kebijakan. Hambatan ini dapat terjadi ketika berbagai lembaga yang terlibat tidak memiliki koordinasi yang baik atau ketika terdapat tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan.

4. **Resistensi dari Pemangku Kepentingan**

Tidak jarang, kebijakan baru menghadapi resistensi dari kelompok tertentu yang merasa kebijakan tersebut merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk protes, lobi untuk mengubah kebijakan, atau bahkan sabotase pelaksanaan program.

5. **Faktor Sosial dan Budaya**

Kebijakan yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, atau adat setempat dapat sulit diterima oleh masyarakat. Misalnya, kebijakan yang mengubah kebiasaan atau pola hidup masyarakat sering kali memerlukan waktu dan pendekatan yang hati-hati agar diterima.

6. **Pengaruh Politik**

Dinamisnya lingkungan politik juga dapat menjadi hambatan. Pergantian kepemimpinan atau perbedaan pandangan di antara aktor politik dapat mempengaruhi keberlanjutan dan konsistensi implementasi kebijakan. Selain itu, kepentingan politik tertentu sering kali memengaruhi arah dan fokus kebijakan.

## **Strategi dan Rekomendasi**

### **Strategi**

Untuk meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian lokal, terutama dalam mendukung peran perempuan tani, diperlukan strategi yang terintegrasi antara kebijakan pemerintah daerah dan partisipasi aktif perempuan tani. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan meliputi:

#### **1. Peningkatan Akses terhadap Teknologi Pertanian**

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perempuan tani di Kecamatan Konda adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan pengetahuan pertanian terbaru. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkenalkan dan menyediakan pelatihan serta akses kepada teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan efisien. Strategi ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga memberdayakan perempuan tani dalam menjalankan usaha tani yang lebih produktif.

#### **2. Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung**

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti akses jalan yang baik, sistem irigasi yang memadai, dan penyediaan fasilitas penyimpanan hasil pertanian yang dapat diakses oleh perempuan tani. Infrastruktur yang baik akan memudahkan mereka dalam distribusi hasil pertanian serta mengurangi kerugian pascapanen.

#### **3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani**

Program pemberdayaan ekonomi perempuan tani melalui pengembangan koperasi pertanian, baik dalam bidang budidaya maupun pemasaran produk pertanian, dapat menjadi strategi yang efektif. Pemerintah daerah dapat memperkenalkan skema pembiayaan yang ramah perempuan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat mendorong kemandirian ekonomi perempuan tani.

#### **4. Pendampingan dan Jaringan Sosial**

Penyuluh pertanian dan lembaga terkait perlu memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada perempuan tani, baik dalam aspek teknis maupun manajerial. Membentuk jaringan sosial atau kelompok tani perempuan yang saling mendukung akan meningkatkan solidaritas, membangun rasa percaya diri, serta membuka peluang untuk kolaborasi dalam kegiatan pertanian yang lebih luas.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan strategi di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan respons positif perempuan tani terhadap kebijakan pemerintah daerah:

#### **1. Fasilitasi Akses Pendidikan dan Pelatihan**

Program pelatihan yang fokus pada keterampilan pertanian dan kewirausahaan perlu diperluas, dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan tani. Pelatihan ini sebaiknya mencakup pengetahuan tentang pertanian organik, pengelolaan usaha pertanian, dan pemanfaatan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal.

## **2. Peningkatan Peran Pemerintah dalam Sosialisasi Kebijakan**

Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian kepada perempuan tani. Penyuluhan yang melibatkan tokoh perempuan yang sudah sukses di sektor pertanian akan lebih efektif dalam mengatasi hambatan budaya dan sosial yang ada.

## **3. Integrasi Gender dalam Kebijakan Pertanian**

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan sektor pertanian yang diimplementasikan benar-benar memperhatikan aspek gender, terutama dalam hal pembagian sumber daya dan akses terhadap dukungan finansial dan teknis. Hal ini akan memastikan bahwa perempuan tani mendapatkan hak yang setara dalam program pembangunan pertanian.

## **4. Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Pertanian untuk Perempuan**

Mengingat seringkali perempuan tani menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menciptakan program kredit mikro atau pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh perempuan tani. Ini akan memperkuat kapasitas mereka untuk mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan.

## **5. Pemantauan dan Evaluasi Dampak Kebijakan**

Untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan ini bisa melibatkan perempuan tani sebagai subjek penelitian untuk mengetahui apa yang sudah berjalan dengan baik dan aspek mana yang masih perlu diperbaiki. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk kebijakan yang lebih inklusif di masa depan.

Dengan melibatkan perempuan tani secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pertanian, serta memberikan akses yang setara kepada mereka dalam berbagai sumber daya, keberlanjutan sektor pertanian di Kecamatan Konda dapat lebih terjamin.

## **PENUTUP**

Studi ini menemukan bahwa perempuan tani memainkan peran yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian, meskipun sering menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kebijakan. Perempuan tani menunjukkan tingkat



kesadaran yang tinggi terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan mendukung sektor pertanian lokal. Namun, partisipasi mereka dalam perumusan kebijakan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan, kurangnya representasi dalam forum pengambilan keputusan, dan kendala budaya yang cenderung menempatkan perempuan pada peran domestik.

Kebijakan pemerintah yang meliputi penyediaan bantuan benih, subsidi pupuk, serta pelatihan pengelolaan hasil pertanian mendapatkan respons positif dari perempuan tani. Mereka memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan produktivitas lahan dan keberlanjutan usaha tani. Namun, implementasi kebijakan sering kali tidak merata, sehingga banyak perempuan tani yang tidak mendapatkan akses terhadap program-program tersebut. Dalam menghadapi keterbatasan kebijakan yang sering kali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, perempuan tani di Kecamatan Konda mengembangkan berbagai strategi adaptasi. Mereka aktif membangun jaringan sosial, seperti kelompok tani perempuan, untuk saling berbagi pengetahuan dan sumber daya. Selain itu, perempuan tani juga mulai mempraktikkan teknik pertanian berkelanjutan, seperti diversifikasi tanaman dan penggunaan pupuk organik, untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Meskipun kebijakan pemerintah daerah telah memberikan berbagai dukungan, perempuan tani masih menghadapi hambatan, termasuk akses terbatas terhadap modal, kurangnya pendampingan teknis yang berkelanjutan, dan minimnya perhatian terhadap peran perempuan dalam pembangunan sektor pertanian.

Tantangan ini menjadi penghalang signifikan dalam mencapai keberlanjutan sektor pertanian di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan partisipasi perempuan tani dalam proses perumusan kebijakan melalui penguatan representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan distribusi program yang lebih merata dan menyediakan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Kebijakan berbasis gender yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan tani sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, M. F., & Wasisto, J. (2022). Perilaku Pencarian Informasi Kelompok Petani Muda Dieng dalam Penerapan Sistem Pertanian Modern. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 6(3). <https://doi.org/10.14710/anuva.6.3.329-342>
- Ammarnurhandyka, M., Sains, F., & Diponegoro, U. (2023). Peran Teknologi Hijau dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Masa Depan. *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 1(1).
- Buchori, D. (2014). Pengendalian Hayati Dan Konservasi Serangga Untuk Pembangunan

Indonesia Hijau. *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian, September*.

- Busthanul, N., Rukmana, D., Mappatunru, W. R., Nadja, R. A., & Saadah, S. (2023). Keberdayaan Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pertanian Di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. *Journal of Agricultural and Rural Economy*, 1(1). <https://doi.org/10.11594/agre.2023.v1i1.24-31>
- Febrinasari, T., & Irfan, Y. (2023). Strategi Teknologi Produksi Xilooligosakarida dari Limbah Pertanian. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 8(1). <https://doi.org/10.33379/gtech.v8i1.3629>
- Gultom, I., Maroeto, M., & Arifin, M. (2022). Kajian Degradasi Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan Untuk Pengembalian Fungsi Lahan. *Jurnal Agrium*, 19(1). <https://doi.org/10.29103/agrium.v19i1.6765>
- Hartini, I. (2022). Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Keberlanjutan Agribisnis Petani Muda Di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat. *Jurnal Ilmu Pertanian Kelingi*, 1(2). <https://doi.org/10.58328/jipk.v1i2.24>
- Hayati, H. (2023). Kapasitas Diri Perempuan Pengolah Hasil Pertanian Berbasis Kedelai Di Kota Mataram. *Jurnal Agrimansion*, 24(1). <https://doi.org/10.29303/agrimansion.v24i1.1332>
- Hermawan, Widyantono, D., & Kusumaningrum, A. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. *Surya Agritama*, 11(1).
- Indra Kertati. (2022). Perempuan Kepala Keluarga Miskin Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Masa Pandemi Covid-19. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 19(1). <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.570>
- Juwianti, A., & Adawiyah, P. R. (2023). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.125>
- Laksana, S., & Gustav, T. I. (2022). Menggagas Indikator Kinerja Agro–Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 5(1). <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.107>
- Mauliyah, N. I., & Sinambela, E. A. (2019). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(1). <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.7>
- Mayrowani, H. (2016). Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30(1). <https://doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.31-47>

- Nado, R. P., Astuti, N. B., & Oktavia, Y. (2023). Analisis Fungsi Kelompok Tani di nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. *JOSETA Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 3(3). <https://doi.org/10.25077/joseta.v3i3.431>
- Ngesti, T. H. A., & Husein, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana terhadap Perempuan di Kabupaten Bantul. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3227>
- Nurkholis, N., Saechon, S., & Susanti, I. (2023). Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Dalam Pengembangan Tanaman Kubis. *Jurnal Ilmiah Hijau Cendekia*, 8(1). <https://doi.org/10.32503/hijau.v8i1.3078>
- Riani, R., Zuriani, Z., Zahara, H., & Hafizin, H. (2021). Fungsi Kelompok Tani Pada Usaha Tani Padi Sawah di Gampong Uteun Bunta Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 6(1). <https://doi.org/10.29103/ag.v6i1.4941>
- Sari, D. P., Syafruddin, R. F., & Kadir, M. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Agricultural Practice (GAP) Untuk Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. *Jurnal Galung Tropika*, 5(3). <https://doi.org/10.31850/jgt.v5i3.161>
- Syarif, A., & Zainuddin, M. (2017). Kontribusi ekonomi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada usahatani sayuran di Kabupaten Bantaeng. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M)*, 2017.
- Toansiba, M., Katmo, E. T. R., Krisnawati, K., & Wambrauw, Y. L. D. (2021). Pengelolaan Tanah dalam Pengetahuan Lokal dan Praktik Pertanian Berkelanjutan pada Masyarakat Arfak, Papua Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3). <https://doi.org/10.18343/jipi.26.3.370>
- Trisanti, T., Fauziah, P., Rofiq, A., & Wijayanto, A. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Giriritro Gunungkidul. *Journal of Millennial Community*, 4(2). <https://doi.org/10.24114/jmic.v4i2.37912>
- Vitasari, Ismail, K., Amrivo, V., & Yulikasari, T. E. (2023). Keterlibatan Perempuan Kamboja dan Indonesia dalam Pembangunan Lingkungan Komoditas Hutan pada Program UN-REDD+. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 4(1). <https://doi.org/10.55448/ems.v4i1.90>
- Wulansari, L., Sukidin, S., & Suharso, P. (2019). Perspektif Gender Penyadap Getah Pinus (Studi Dari Aspek Peran Pekerjaan Dan Pendapatan Pada Keluarga Penyadap Getah Pinus Di Desa Jambewangi Kph Banyuwangi Barat). *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i1.10420>